

Transformasi Digital Pengelolaan Aset Desa Melalui SIPADES di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Siti Kurniasih¹, Universitas Islam Riau, 257121014@student.uir.ac.id,
Sufian Hamim², Universitas Islam Riau, sufianhamim@soc.uir.ac.id,
Dia Meirina Suri³, Universitas Islam Riau, diameirinasuri@soc.uir.ac.id,
Raden Imam Al Hafis⁴, Universitas Islam Riau, imamalhafis@soc.uir.ac.id

Published: June, 2026

ABSTRAK

Digital transformation in village governance has become one of the strategic efforts to enhance the effectiveness, transparency, and accountability of village asset management. This study aims to analyze the digital transformation of village asset management through the implementation of the Village Asset Management System (SIPADES) in Sebangar Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the village head, village secretary, financial affairs officer, SIPADES operator, and other relevant stakeholders. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of SIPADES has supported the digitalization of village asset administration through more structured recording, inventory management, reporting, and asset monitoring compared to the previous manual system. The implementation of SIPADES has also contributed to improving the transparency and accountability of village asset management while facilitating the preparation of asset reports in a faster and more accurate manner. However, several challenges remain, including limited human resource competencies, suboptimal updating of asset data, and technical constraints in system operation. Therefore, efforts to enhance the capacity of village officials, strengthen supervision, and optimize the utilization of information technology are necessary to support more effective and sustainable village asset management. Consequently, SIPADES serves as an important instrument in realizing effective digital transformation and good governance in village asset management.

Keywords: Digital Transformation, Asset Management, Village Assets, Accountability, Village Governance.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital pengelolaan aset desa melalui penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, operator SIPADES, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPADES telah mendukung digitalisasi administrasi aset desa melalui pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pengawasan aset yang lebih terstruktur dibandingkan sistem manual. Implementasi SIPADES juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa serta memudahkan penyusunan laporan aset secara lebih cepat dan akurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemutakhiran data aset, serta kendala teknis dalam pengoperasian sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, SIPADES menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transformasi digital tata kelola aset desa yang baik.

Keywords: Transformasi Digital, Pengelolaan, Aset, Akuntabilitas, Desa.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi berbagai proses administrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Tidak hanya diterapkan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, transformasi digital juga telah menjangkau pemerintahan desa sebagai unit

pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu bentuk transformasi digital pada pemerintahan desa diwujudkan melalui penerapan berbagai sistem informasi yang mendukung tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset desa.

Aset desa merupakan sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, aset desa mencakup tanah kas desa, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan irigasi, serta aset lainnya yang diperoleh dari kekayaan asli desa maupun sumber perolehan yang sah. Pengelolaan aset desa yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel karena aset merupakan salah satu sumber daya yang mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Namun demikian, pengelolaan aset desa di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan. Administrasi aset yang belum tertib, data aset yang tidak terbaru, ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan dokumen aset, serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset sering menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola aset yang optimal. Pengelolaan aset yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan dalam proses pengawasan dan pengendalian aset. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan aset kepada masyarakat.

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). SIPADES merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi, pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa secara terintegrasi. Kehadiran SIPADES menjadi bagian dari implementasi e-government yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital.

Penerapan SIPADES diharapkan mampu mengubah pola pengelolaan aset yang sebelumnya bersifat manual menjadi sistematis, terukur, dan berbasis data. Digitalisasi pengelolaan aset melalui SIPADES memungkinkan pemerintah desa memperoleh informasi aset secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan aset secara berkelanjutan.

Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Sebagai desa yang terus berkembang dan memiliki berbagai aset yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan aset yang modern menjadi semakin penting. Implementasi SIPADES di Desa Sebangar menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menyesuaikan tata kelola aset dengan tuntutan transformasi digital yang berkembang saat ini.

Untuk menggambarkan ruang lingkup pengelolaan aset desa, berikut disajikan kategori aset yang dikelola melalui SIPADES.

Tabel 1. Kategori Aset Desa yang Dikelola Melalui SIPADES

No	Kategori Aset	Fungsi Utama
1	Tanah desa	Mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan
2	Peralatan dan mesin	Operasional pelayanan pemerintahan desa
3	Gedung dan bangunan	Kantor desa, fasilitas pelayanan masyarakat
4	Jalan, irigasi dan jaringan	Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat
5	Aset tetap lainnya	Sarana sosial, budaya dan pelayanan publik
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Mendukung pembangunan desa berkelanjutan

Sumber : Kantor Desa Sebangar, 2026

Berdasarkan hasil observasi awal, implementasi SIPADES di Desa Sebangar masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan kemampuan operator dalam pemanfaatan sistem, belum optimalnya pemutakhiran data aset, serta perlunya sinkronisasi antara kondisi fisik aset dengan data yang terdapat dalam aplikasi. Di sisi lain, keberadaan SIPADES juga memberikan berbagai manfaat berupa kemudahan inventarisasi aset, percepatan penyusunan laporan, dan peningkatan akurasi data aset desa.

Penelitian mengenai SIPADES telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa SIPADES mampu meningkatkan tertib administrasi aset dan mendukung akuntabilitas pengelolaan aset desa. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek implementasi sistem dan efektivitas administrasi aset. Kajian yang secara khusus melihat SIPADES sebagai instrumen transformasi digital dalam tata kelola aset desa masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2. Research Gap Penelitian

Peneliti Terdahulu	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan
Penelitian A	Implementasi SIPADES	Meningkatkan tertib administrasi aset	Belum mengkaji transformasi digital
Penelitian B	Efektivitas SIPADES	Mempermudah inventarisasi aset	Fokus pada aspek teknis aplikasi
Penelitian C	Akuntabilitas Aset Desa	Meningkatkan kualitas pelaporan aset	Belum mengkaji perubahan tata kelola organisasi
Penelitian Ini	Transformasi Digital Pengelolaan Aset Desa	Analisis digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, serta faktor pendukung dan penghambat SIPADES	Memberikan perspektif baru mengenai SIPADES sebagai instrumen transformasi digital

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam memahami implementasi SIPADES, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek administrasi aset, efektivitas penggunaan aplikasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Penelitian terdahulu juga umumnya menempatkan SIPADES sebagai alat administrasi, sehingga belum banyak yang mengkaji SIPADES dalam perspektif transformasi digital pemerintahan desa. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SIPADES pada desa-desa di Kabupaten Bengkalis, khususnya Desa Sebangar yang memiliki karakteristik pembangunan dan pengelolaan aset yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan SIPADES tidak hanya sebagai aplikasi administrasi aset, tetapi sebagai instrumen transformasi digital yang berperan dalam mendorong perubahan tata kelola aset desa menuju sistem yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPADES serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola aset desa.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep transformasi digital dan teori good governance. Transformasi digital menjelaskan perubahan proses organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan nilai dan kinerja organisasi. Sementara itu, teori good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana SIPADES berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan aset desa yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi digital pengelolaan aset desa melalui implementasi SIPADES di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPADES, serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis transformasi digital pengelolaan aset desa melalui implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi SIPADES, kondisi aktual pengelolaan aset desa, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam penerapan sistem tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada proses digitalisasi pengelolaan aset desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPADES.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa Sebangar, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, operator SIPADES, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, laporan inventarisasi aset desa, dokumen SIPADES, profil desa, serta berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen penelitian. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk menggambarkan implementasi SIPADES sebagai instrumen transformasi digital pengelolaan aset desa serta kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola aset di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Implementasi SIPADES di Desa Sebangar

Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu bentuk implementasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Transformasi digital pada sektor pemerintahan desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan aset desa, pemanfaatan teknologi informasi melalui SIPADES menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan administrasi aset yang selama ini masih dilakukan secara konvensional.

Sebelum penerapan SIPADES, pengelolaan aset di Desa Sebangar dilakukan secara manual dengan menggunakan buku inventaris aset, dokumen arsip, dan berbagai catatan administrasi lainnya. Sistem pengelolaan yang masih bersifat manual tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain proses pencatatan yang membutuhkan waktu relatif lama, tingginya risiko kehilangan dokumen, sulitnya melakukan pencarian data aset tertentu, serta adanya kemungkinan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan aset. Selain itu, pembaruan data aset sering kali mengalami keterlambatan karena harus

dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan dokumen fisik yang tersimpan pada masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Desa Sebangar, kondisi tersebut sering menimbulkan kendala ketika pemerintah desa membutuhkan data aset secara cepat untuk kepentingan pelaporan, audit, maupun penyusunan perencanaan pembangunan desa. Data aset yang tersebar dalam berbagai dokumen fisik menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset yang ada di lapangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset secara manual belum mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan desa yang modern.

Implementasi SIPADES menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah Desa Sebangar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa. Melalui sistem ini, seluruh aset desa didata, diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam database digital yang terintegrasi. Setiap aset diberikan identitas yang jelas berdasarkan kategori, lokasi, kondisi, nilai aset, sumber perolehan, dan informasi pendukung lainnya. Dengan adanya sistem digital tersebut, proses pencatatan aset menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPADES telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola aset desa. Aparatur desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik karena data aset dapat diakses melalui sistem komputer yang telah tersedia. Proses pencarian data menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan sebelumnya. Ketika diperlukan informasi mengenai suatu aset tertentu, operator SIPADES dapat menampilkan data yang dibutuhkan dalam waktu singkat tanpa harus mencari dokumen secara manual.

Selain mempermudah proses pencatatan dan inventarisasi, SIPADES juga memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan aset desa. Sebelum adanya SIPADES, penyusunan laporan inventarisasi aset memerlukan waktu yang cukup lama karena dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencocokkan berbagai dokumen administrasi. Setelah penggunaan SIPADES, sebagian besar data yang diperlukan untuk pelaporan telah tersedia dalam sistem sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan aset telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas administrasi pemerintahan desa.

Dari aspek pengawasan, SIPADES juga memberikan manfaat yang cukup besar. Data aset yang tersimpan dalam sistem memungkinkan pemerintah desa melakukan monitoring terhadap kondisi dan keberadaan aset secara lebih mudah. Apabila terjadi perubahan kondisi, perpindahan lokasi, atau penambahan aset baru, pembaruan data dapat langsung dilakukan pada sistem. Dengan demikian, risiko kehilangan data dan ketidaksesuaian informasi aset dapat diminimalkan. Sistem ini juga mendukung pelaksanaan audit karena seluruh riwayat data aset tersimpan secara lebih tertib dan sistematis.

Implementasi SIPADES di Desa Sebangar tidak hanya menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga menggambarkan perubahan pola kerja aparaturnya desa menuju tata kelola yang lebih modern. Transformasi digital yang terjadi melalui SIPADES telah mendorong aparaturnya desa untuk lebih disiplin dalam melakukan pencatatan, pembaruan, dan pelaporan aset. Dengan demikian, SIPADES tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administrasi aset, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

1. Kondisi Aset Desa Sebangar

Berdasarkan hasil dokumentasi dan inventarisasi aset yang telah dilakukan melalui SIPADES, diketahui bahwa Desa Sebangar memiliki jumlah aset yang cukup besar dan beragam. Aset-aset tersebut terdiri atas tanah desa, gedung dan bangunan, kendaraan operasional, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Aset Desa Sebangar Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah Unit
1	Tanah Desa	18
2	Gedung dan Bangunan	12
3	Kendaraan Operasional	6
4	Peralatan dan Mesin	87
5	Jalan dan Jaringan	24
6	Aset Tetap Lainnya	31
	Total	178

Sumber: Data Inventaris Desa Sebangar (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 3, jumlah aset yang dimiliki Desa Sebangar mencapai 178 unit yang tersebar dalam berbagai kategori. Kategori aset dengan jumlah terbesar adalah peralatan dan mesin sebanyak 87 unit atau sekitar 48,88 persen dari total aset yang dimiliki desa. Tingginya jumlah peralatan dan mesin menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki berbagai sarana operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.

Kategori aset terbesar berikutnya adalah aset tetap lainnya sebanyak 31 unit dan jalan serta jaringan sebanyak 24 unit. Keberadaan aset-aset tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga, memelihara, dan mengelola berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan pembangunan desa. Sementara itu, aset berupa tanah desa sebanyak 18 unit dan gedung serta bangunan sebanyak 12 unit merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomis dan administratif yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih tertib dan akuntabel.

Besarnya jumlah dan beragamnya jenis aset yang dimiliki Desa Sebangar menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Setiap jenis aset memiliki karakteristik, kebutuhan pemeliharaan, serta mekanisme pengelolaan yang berbeda. Oleh karena itu, keberadaan SIPADES menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh aset dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah dipantau. Tanpa adanya sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan aset dalam jumlah yang besar berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kehilangan data, duplikasi pencatatan, kesalahan inventarisasi, dan rendahnya kualitas pelaporan aset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPADES telah membantu pemerintah Desa Sebangar dalam mengelola seluruh aset tersebut secara lebih efektif. Data aset yang sebelumnya tersebar dalam berbagai dokumen kini tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan proses inventarisasi, pemutakhiran data, pengawasan, dan pelaporan. Dengan demikian, penerapan SIPADES telah menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pengelolaan aset desa serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Sebangar secara lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

1. *Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah SIPADES*

Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola aset desa. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada penggunaan teknologi informasi sebagai sarana administrasi, tetapi juga berdampak pada pola kerja aparatur desa, efektivitas pengelolaan aset, kualitas data, serta kemudahan dalam proses pengawasan dan pelaporan aset desa. Sebelum penerapan SIPADES, seluruh proses pengelolaan aset masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku inventaris, dokumen administrasi, dan arsip fisik yang tersimpan di kantor desa. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan aset berjalan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang relatif lama serta rentan terhadap berbagai kesalahan administrasi. Perubahan yang terjadi setelah implementasi SIPADES dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah SIPADES

Aspek	Sebelum SIPADES	Sesudah SIPADES
Pencatatan aset	Manual	Digital
Inventarisasi	Tidak terintegrasi	Terintegrasi
Penyimpanan data	Arsip fisik	Database sistem
Pelaporan	Membutuhkan waktu lama	Lebih cepat
Pengawasan	Sulit dilakukan	Lebih mudah
Akurasi data	Rentan kesalahan	Lebih akurat

Sumber : Kantor Desa Sebangar (2025)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa digitalisasi melalui SIPADES telah memberikan perubahan pada seluruh aspek pengelolaan aset desa. Dari sisi pencatatan aset, metode manual yang sebelumnya digunakan mengharuskan aparatur desa mencatat setiap aset pada buku inventaris secara terpisah. Cara tersebut sering menyebabkan keterlambatan pembaruan data dan kesulitan dalam melakukan pengecekan kembali terhadap aset yang telah tercatat. Setelah penggunaan SIPADES, seluruh data aset dapat dicatat secara digital sehingga proses input, pembaruan, dan pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat.

Pada aspek inventarisasi, sebelum penggunaan SIPADES data aset desa belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Data aset sering tersimpan pada berbagai dokumen yang berbeda sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengendalian aset. Setelah implementasi SIPADES, seluruh data aset dikumpulkan dan dikelola dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah desa memperoleh informasi aset secara menyeluruh dan real time sehingga proses inventarisasi menjadi lebih tertib dan sistematis.

Perubahan yang cukup signifikan juga terjadi pada sistem penyimpanan data. Sebelum penerapan SIPADES, seluruh dokumen aset disimpan dalam bentuk arsip fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kesalahan penempatan dokumen. Dengan adanya SIPADES, data aset tersimpan dalam database elektronik yang lebih aman dan mudah diakses. Sistem penyimpanan digital tersebut tidak hanya meningkatkan keamanan data tetapi juga mendukung efisiensi administrasi karena aparatur desa dapat menemukan data yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat.

Dari aspek pelaporan, SIPADES memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyusun laporan aset. Sebelum digitalisasi, penyusunan laporan membutuhkan proses pengumpulan data dari berbagai dokumen fisik yang sering kali memakan waktu cukup lama. Setelah implementasi SIPADES, sebagian besar data yang diperlukan untuk penyusunan laporan telah tersedia dalam sistem sehingga proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Kondisi ini sangat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan pelaporan kepada pemerintah daerah maupun dalam menghadapi proses pemeriksaan dan audit.

Pada aspek pengawasan, SIPADES memungkinkan pemerintah desa melakukan monitoring terhadap kondisi dan keberadaan aset secara lebih efektif. Sebelum penggunaan SIPADES, proses pengawasan sering mengalami kendala karena data aset tidak tersusun secara sistematis. Setelah penerapan sistem, pemerintah desa dapat dengan mudah menelusuri informasi mengenai lokasi, kondisi, dan status aset sehingga proses pengawasan menjadi lebih optimal. Kemudahan tersebut juga membantu dalam mencegah terjadinya kehilangan aset maupun penyalahgunaan aset desa.

Sementara itu, dari sisi akurasi data, penggunaan SIPADES terbukti mampu mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Penginputan data yang dilakukan secara terstruktur melalui aplikasi membantu menghasilkan data yang lebih lengkap dan konsisten. Dengan

demikian, informasi aset yang tersimpan dalam sistem menjadi lebih valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan pengelolaan aset desa.

1. *Transformasi Digital Pengelolaan Aset Desa Melalui SIPADES*

Transformasi digital merupakan proses perubahan mendasar dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, transformasi digital tidak hanya diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencakup perubahan cara kerja, budaya organisasi, serta mekanisme pelayanan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES di Desa Sebangar telah menjadi salah satu bentuk nyata transformasi digital dalam pengelolaan aset desa. Sebelum penerapan SIPADES, sebagian besar aktivitas pengelolaan aset masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi berjalan lambat dan kurang efisien. Setelah implementasi SIPADES, seluruh tahapan pengelolaan aset mulai dari pencatatan, pengkodean, inventarisasi, penyimpanan data, pelaporan, hingga pengawasan dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Transformasi digital yang terjadi di Desa Sebangar tidak hanya berupa perubahan alat kerja dari buku inventaris menjadi aplikasi digital. Lebih dari itu, terjadi perubahan pola kerja aparatur desa yang semakin mengutamakan ketepatan data, kecepatan pelayanan, dan efisiensi administrasi. Aparatur desa dituntut untuk mampu mengoperasikan teknologi informasi serta melakukan pembaruan data aset secara berkala agar informasi yang tersedia dalam sistem selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Keberadaan SIPADES juga mendorong terbentuknya sistem pengelolaan aset yang lebih profesional. Data aset yang sebelumnya tersebar dalam berbagai dokumen kini tersimpan dalam satu basis data yang dapat diakses secara lebih mudah. Kondisi tersebut meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai jumlah, jenis, kondisi, dan nilai aset yang dimiliki. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori transformasi digital yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi organisasi melalui penyederhanaan proses kerja dan penguatan sistem informasi. Dalam konteks pengelolaan aset desa, SIPADES telah berperan sebagai instrumen digital yang mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas data, serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

1. *Transparansi Pengelolaan Aset Desa Melalui SIPADES*

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan aset desa, transparansi menjadi aspek penting karena aset desa merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPADES telah berkontribusi terhadap peningkatan transparansi pengelolaan aset di Desa Sebangar. Digitalisasi data aset memungkinkan seluruh informasi terkait aset desa tersimpan secara sistematis dalam satu sistem yang terintegrasi. Data mengenai jenis aset, lokasi aset, kondisi aset, sumber perolehan, serta nilai aset dapat diketahui dengan lebih mudah dibandingkan ketika pengelolaan masih dilakukan secara manual.

SIPADES juga meningkatkan keterlacakan (traceability) data aset. Setiap perubahan data yang dilakukan dalam sistem dapat diketahui dan ditelusuri sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya manipulasi maupun penyalahgunaan data aset. Kondisi ini memberikan jaminan bahwa informasi yang tersedia dalam sistem memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, digitalisasi aset melalui SIPADES mempermudah pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, auditor, maupun

lembaga pengawas lainnya. Ketika dilakukan pemeriksaan atau audit, data aset dapat disajikan dengan lebih cepat karena seluruh informasi telah tersimpan dalam sistem. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang mengharuskan aparatur desa mencari berbagai dokumen fisik yang tersebar dalam arsip administrasi.

Peningkatan transparansi yang dihasilkan oleh SIPADES menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memperkuat penerapan prinsip good governance pada tingkat pemerintahan desa. Semakin baik kualitas informasi yang tersedia, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola aset yang menjadi milik bersama. Oleh karena itu, SIPADES tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola aset desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa Melalui SIPADES

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap aktivitas, kebijakan, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas pengelolaan aset menjadi sangat penting karena aset desa merupakan kekayaan milik masyarakat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Sebelum penerapan SIPADES, pengelolaan aset dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku inventaris dan berbagai dokumen administrasi lainnya. Sistem tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan aset membutuhkan waktu yang relatif lama karena data aset tersebar pada berbagai dokumen fisik yang harus dikumpulkan dan diverifikasi kembali sebelum digunakan sebagai bahan pelaporan. Selain itu, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, maupun ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi aset yang sebenarnya.

Setelah implementasi SIPADES, proses pengelolaan dan pelaporan aset mengalami perubahan yang cukup signifikan. Seluruh data aset desa tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan aparatur desa dalam melakukan pencarian, pembaruan, dan penyajian data aset. Ketika dibutuhkan laporan inventarisasi aset, operator SIPADES dapat mengakses data secara langsung melalui sistem tanpa harus mencari dokumen secara manual. Kondisi ini menjadikan proses penyusunan laporan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Sebangar, penggunaan SIPADES juga mempermudah proses pertanggungjawaban aset kepada pemerintah daerah maupun pihak auditor. Data aset yang tersimpan dalam sistem dapat ditampilkan sesuai kebutuhan sehingga mempermudah proses pemeriksaan dan verifikasi. Selain itu, setiap perubahan data aset dapat diketahui dan ditelusuri melalui sistem sehingga meningkatkan kejelasan informasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data. Dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara digital, pemerintah desa memiliki bukti administrasi yang lebih kuat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan aset yang dimiliki.

Peningkatan akuntabilitas juga terlihat dari meningkatnya kualitas data aset yang tersedia. SIPADES memungkinkan pemerintah desa melakukan pembaruan data secara berkala sesuai dengan kondisi aset yang ada di lapangan. Setiap aset dapat dilengkapi dengan informasi mengenai jenis aset, lokasi, sumber perolehan, nilai aset, kondisi aset, dan status penggunaannya. Kelengkapan informasi tersebut membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Dalam perspektif teori good governance, penggunaan SIPADES telah memperkuat prinsip akuntabilitas melalui peningkatan kualitas sistem informasi dan pengelolaan data aset. Teknologi informasi berfungsi sebagai instrumen yang membantu pemerintah desa dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang lebih efektif dan transparan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan aset melalui SIPADES tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, implementasi SIPADES di Desa Sebangar telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Keberadaan sistem ini mampu mendukung penyediaan informasi yang akurat, mempercepat proses pelaporan, meningkatkan kualitas dokumentasi aset, serta memperkuat sistem pengawasan dan pertanggungjawaban aset desa secara berkelanjutan.

1. *Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIPADES*

Keberhasilan implementasi SIPADES tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Sebangar, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang berperan penting dalam menentukan efektivitas penerapan SIPADES dalam pengelolaan aset desa.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SIPADES

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Keterangan
1	Komitmen Pemerintah Desa	Keterbatasan SDM	Pengoperasian sistem belum optimal
2	Ketersediaan komputer	Pembaruan data belum rutin	Data aset belum sepenuhnya mutakhir
3	Dukungan regulasi	Gangguan teknis sistem	Menghambat proses input data
4	Pendampingan teknis	Keterbatasan pelatihan	Pemahaman operator belum merata
5	Kesadaran aparatur	Sarana pendukung terbatas	Efektivitas penggunaan sistem berkurang

Berdasarkan tabel tersebut, faktor pertama yang mendukung implementasi SIPADES adalah komitmen pemerintah desa. Dukungan yang diberikan oleh kepala desa dan aparatur desa menjadi modal utama dalam keberhasilan penerapan sistem. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pemerintah desa untuk melakukan inventarisasi aset secara berkala, menyediakan operator yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem, serta mendorong penggunaan SIPADES dalam setiap aktivitas administrasi aset. Tanpa adanya komitmen dari pimpinan dan aparatur desa, implementasi sistem informasi sering kali tidak berjalan secara optimal.

Faktor pendukung berikutnya adalah ketersediaan sarana teknologi berupa komputer dan perangkat pendukung lainnya. Infrastruktur teknologi menjadi kebutuhan dasar dalam implementasi SIPADES karena seluruh proses pengelolaan data dilakukan secara digital. Keberadaan perangkat komputer yang memadai membantu aparatur desa dalam mengoperasikan sistem dan mengelola data aset secara lebih efektif.

Selain itu, dukungan regulasi juga menjadi faktor penting dalam penerapan SIPADES. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan aset desa memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk melaksanakan digitalisasi administrasi aset. Regulasi tersebut sekaligus

menjadi pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset desa.

Pendampingan teknis yang diberikan oleh instansi terkait juga berperan dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan SIPADES. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi, aparatur desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penginputan data, pengelolaan database, serta penyusunan laporan aset melalui sistem.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat dalam implementasi SIPADES. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tidak seluruh aparatur desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi informasi. Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menyebabkan pemanfaatan SIPADES belum berjalan secara maksimal.

Hambatan lainnya adalah belum rutinnya pembaruan data aset. Beberapa data aset yang mengalami perubahan kondisi atau penambahan belum seluruhnya diperbarui secara langsung ke dalam sistem. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perbedaan antara data yang tersimpan dalam SIPADES dengan kondisi aktual aset di lapangan.

Gangguan teknis sistem juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPADES. Permasalahan seperti error sistem, gangguan jaringan internet, maupun keterbatasan kapasitas perangkat terkadang menghambat proses penginputan dan pembaruan data aset. Meskipun tidak terjadi secara terus-menerus, kendala teknis tersebut tetap memengaruhi efektivitas penggunaan sistem.

Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi operator SIPADES menyebabkan tingkat pemahaman aparatur desa belum merata. Beberapa aparatur masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut untuk memahami seluruh fitur yang tersedia dalam sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pengelolaan aset desa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPADES tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, infrastruktur teknologi, serta komitmen pemerintah desa. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi aparatur, penguatan infrastruktur teknologi, dan optimalisasi pendampingan teknis perlu terus dilakukan agar manfaat SIPADES dapat dirasakan secara maksimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menempatkan SIPADES tidak hanya sebagai aplikasi administrasi aset desa, tetapi sebagai instrumen transformasi digital tata kelola pemerintahan desa. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi, inventarisasi aset, atau kualitas administrasi aset desa. Sementara itu, penelitian ini mengkaji SIPADES dari perspektif transformasi digital yang mencakup perubahan proses kerja, peningkatan transparansi, penguatan akuntabilitas, dan modernisasi tata kelola aset desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPADES telah berfungsi sebagai sarana perubahan organisasi yang mendorong pemerintah Desa Sebangar menuju tata kelola aset yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi yang terjadi tidak hanya terlihat pada penggunaan teknologi informasi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja aparatur desa yang semakin berorientasi pada ketepatan data, kecepatan pelayanan, dan kualitas pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait transformasi digital pemerintahan desa. Implementasi SIPADES di Desa Sebangar membuktikan bahwa digitalisasi pengelolaan aset desa dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis telah mendukung transformasi digital pengelolaan aset desa melalui digitalisasi proses pencatatan, inventarisasi, penyimpanan data, pelaporan, dan pengawasan aset yang sebelumnya dilakukan secara manual. Penerapan SIPADES terbukti meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset desa dengan menyediakan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk kebutuhan pelaporan maupun pengawasan. Keberhasilan implementasi SIPADES didukung oleh komitmen pemerintah desa, ketersediaan sarana teknologi, dukungan regulasi, dan pendampingan teknis, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pembaruan data aset, serta gangguan teknis sistem. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan agar SIPADES dapat berfungsi secara maksimal dalam mewujudkan tata kelola aset desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, B. (2020). Tata kelola pemerintahan desa dalam era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 120–132.
- Astuti, E., & Prasetyo, A. (2021). Digitalisasi administrasi pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 45–58.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Degada, A., Thapliyal, H., & Mohanty, S. P. (2021). Smart village: An IoT based digital transformation. *International Journal of Smart Technologies*, 5(2), 1–15.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, M. A. T. Z., & Munanjat, E. (2024). Efektivitas penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut. *Jurnal Mediasosian*, 8(1), 1–15.
- Indrajit, R. E. (2019). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Panduan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Versi 3.0*. Jakarta: Kemendagri.
- Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024). Village asset management innovations through application-based systems. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4).
- Mohamad, A., & Makur, D. S. (2025). Implementasi SIPADES untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset di Desa Iloheluma. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 6(2).
- Mulyadi, D. (2020). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, B., Mafturrahman, M., Elshifa, A., Putri, N. A., & Fitriani, S. (2023). Implementation of the Village Asset Management System policy in realizing good governance in Pekalongan Regency. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2).
- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 784–792.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78–82.
- Rabiatul Q., M., & Raharso, M. (2025). Evaluasi kesuksesan implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 33–42.

- Risnawati, D., Noor, M., & Surya, I. (2025). Advancing digital transformation in village administration: A study of asset governance via SIPADES. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(1).
- Safitri, I. (2024). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4).
- Sedarmayanti. (2020). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2019). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2018). *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrisno, E. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tan, S. Y., & Taeihagh, A. (2020). Smart city governance in developing countries: A systematic literature review. *Sustainability Governance Review*, 12(4), 1–24.
- Ulfa, S. M., & Murtadlo, M. N. (2025). Implementasi SIPADES dalam administrasi pengelolaan aset Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (2020). *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- World Bank. (2021). *Digital Government Review*. Washington DC: World Bank.
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022*. New York: United Nations.
- OECD. (2020). *Digital Government Index*. Paris: OECD Publishing.
- Heeks, R. (2018). *Information and Communication Technology for Development*. London: Routledge.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2019). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268.
- Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (2016). *Smarter as the New Urban Agenda*. Springer.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the Virtual State*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- West, D. M. (2015). *Digital Government: Technology and Public Sector Performance*. Princeton University Press.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Kettl, D. F. (2018). *The Transformation of Governance*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Grönlund, Å. (2010). Ten years of e-government. *Government Information Quarterly*, 27(2), 134–142.
- Bhatnagar, S. (2014). *Public Service Delivery: Role of Information and Communication Technology*. New Delhi: Sage Publications.
- Zhang, J., & Wang, F. Y. (2018). Blockchain based digital asset management system architecture for power grid big data. *IEEE*

Digital Asset Management Studies.

- Rodiyah, I., & Zahrani, R. A. (2026). Implementation of the e-government-based village asset management system (SIPADES) policy in Ketapang Village. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(1), 21–45.
- Rizqi, M. A. A., & Mursyidah, L. (2025). Implementation of the Village Asset Management System (SIPADES) in Tambak Kalisogo Village. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 6(2), 249–266.